

Sistem Informasi Manajemen untuk Manajemen Keuangan Pemerintah Kotamadya

Muhammad Sabari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20471052&lokasi=lokal>

Abstrak

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah dengan cepat dan dinamis, kemampuan mengelola sumberdaya keuangan yang terbatas secara efisien dan efektif telah menjadi tantangan tidak saja bagi sektor swasta tetapi juga bagi sektor pemerintahan. Perubahan-perubahan yang terjadi belakangan ini dalam kebijaksanaan pembangunan daerah telah mengisyaratkan bahwa daerah tingkat II akan memainkan peranan yang semakin penting.

Lingkungan yang berubah dengan cepat menciptakan ketidak-pastian yang tinggi. Salah satu usaha untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini adalah melalui penyajian informasi bagi manajemen. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen (SIM) yang efektif.

Pemerintah kotamadya merupakan organisasi nirlaba yang memiliki berbagai ciri khusus seperti tidak adanya ukuran laba, kurangnya ketergantungan sumberdana pada pelanggan, serta adanya tujuan yang sulit diukur dan bersifat majemuk. Dengan kendala-kendala tersebut di atas, pemerintah kotamadya harus menjalankan berbagai fungsi dalam rangka desentralisasi urusan pemerintahan seperti fungsi penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, pembangunan, perwalian, koordinasi dan perencanaan. Menghadapi tugas yang berat dengan berbagai kendala yang ada, pemerintah kotamadya membutuhkan suatu SIM yang efektif, khususnya dalam manajemen keuangan.

Manajemen keuangan pemerintah kotamadya merupakan proses yang mencakup berbagai siklus seperti perencanaan keuangan, manajemen biaya, dan pengendalian akuntansi. Salah satu ciri utama dari manajemen keuangan pemerintah kotamadya yang membedakannya dari sektor swasta adalah adanya pengeluaran investasi dan operasional yang berjalan terus menerus secara bersamaan. Ciri lainnya, khususnya pada pemerintah kotamadya di Indonesia, adalah adanya sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.

Berbagai peralatan manajemen keuangan pemerintah kotamadya sebenarnya merupakan yang diadaptasi dari sektor swasta, khususnya dalam bidang penganggaran. Dengan makin berkembangnya teknologi pengolahan data, maka terbuka berbagai SIM yang dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Salah satu perkembangan yang pesat terjadi pada usaha untuk memberikan informasi untuk proses pengambilan keputusan yang semi-terstruktur melalui sistem pendukung keputusan.

Pemerintah kotamadya merupakan salah satu bentuk dari pemerintah daerah tingkat U yang merupakan bentuk pemerintahan di daerah perkotaan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, penekanan otonomi daerah berada pada pemerintah daerah tingkat II. Dewasa mi, dengan makin berkurangnya sumber pendapatan pemerintah pusat dari sektor migas, maka pemerintah kotamadya dihadapkan pada tantangan untuk Iebih mandiri, khususnya dalam pembiayaan investasi dan kegiatan di daerah. Tantangan tidak mudah karena sampai saat mi tingkat ketergantungan pada sumber dana pusat masih jauh di atas rata-rata standar dunia.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah kotamadya masih memiliki organisasi manajemen keuangan daerah yang tersebar pada berbagai unit kerja seperti Bappeda untuk perencanaan investasi, Bagian Pembangunan untuk pengendaUan pengeluaran investasi, Dipenda untuk perencanaan dan pengendaUan pendapatan, dan Bagian Keuangan untuk perencanaan dan pengendalian pengeluaran operasional. Tidak adanya suatu unit organisasi yang bertanggungjawab menyeluruh dalam manajemen keuangan menyebabkan hampir seuruh laporan keuangan ditujukan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah selalu pimpinan puncak di daerah.

Dalam perencanaan keuangan, pemerintah kotamadya sudah memiliki rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang baku, melalui Pola Dasar dan Repelita Daerah. Meskipun demikian, terdapat jurang pemisah antara rencana-rencana tersebut dengan anggaran tahunan karena belum adanya perangkat pemrograman dalam bentuk anggaran jangka menengah.

Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang dimiliki mengisyaratkan perlunya dikembangkan suatu SIM untuk manajemen keuangan. Pengembangan SIM tersebut perlu dimulai dari sistem informasi akuntansi antara lain dengan menerapkan struktur akuntansi yang berorientasi pada program. Struktur mi memerlukan perubahan mendasar pada struktur pos rutin dan pendapatan yang selama mi lebih berorientasi pada unit organisasi dan jenis pendapatan. Disamping sudah dirasakan perlunya pengembangan akuntansi biaya, mulai dan bentuk yang sederhana dengan mengidentifikasi biaya dan pendapatan suatu program sampai dengan analisis biaya secara ekonomis.

Akhirnya dibutuhkan adanya information sharing khususnya untuk mengkonsolidasikan data-data perencanaan seperti statistik kebutuhan masyarakat, identifikasi prasarana yang tersedia, dan tingkat pelayanan yang ada. Hal yang sama juga diperlukan untuk memadukan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan dalam suatu struktur SIM yang terpadu.

Keberhasilan suatu sistem akan sangat dipengaruhi oleh pengorganisasian dan kualitas pelaksana. Berkaitan dengan hal mi, sudah dirasakan perlunya penyesuaian organisasi dengan pola pelayanan yang diberikan serta peningkatan peranan manajemen keuangan dari fungsi pembukuan (score-keeping) menjadi fungsi penasehat keuangan (attention directing). Perubahan

membutuhkan peningkatan kualitas pegawai yang harus dicapai melalui pelatihan dalam tugas yang efektif.